

ABSTRAK

Whistleblowing system adalah upaya yang sedang dikembangkan oleh pemerintah untuk menurunkan angka korupsi di Indonesia. Namun demikian, implementasinya tidak mudah karena sektor pemerintah cenderung birokratis. Identifikasi faktor-faktor yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *whistleblowing system* pada pemerintah Indonesia sangat diperlukan untuk mendorong keberhasilan implementasinya. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menguji beberapa variabel yang diduga berpengaruh terhadap intensi *whistleblowing* pada sektor pemerintah pada umumnya dan pada unit instansi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP pada khususnya. Variabel-variabel tersebut antara lain adalah *ethical climate*, *job level*, *ethical judgement*, *locus of control*, *organizational commitment*, *level of seriousness wrongdoer*, *status wrongdoer*, *gender*, *age*, dan masa kerja.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 180 orang responden dengan kriteria pernah melaksanakan penugasan investigasi pada instansi BPKP. Kriteria tersebut dipilih karena personil yang pernah terlibat dalam penugasan investigasi sering menghadapi kondisi dilematik ketika menghadapi tindakan *wrongdoing* yang dilakukan oleh *wrongdoer*.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa dalam konteks instansi BPKP, *locus of control*, *level of seriousness wrongdoer*, *status wrongdoer*, dan jenis kelamin memiliki pengaruh signifikan terhadap intensi *whistleblowing*. Sedangkan, *ethical climate*, *job level*, *ethical judgement*, *organizational commitment*, *age*, dan masa kerja tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap intensi *whistleblowing*.

Kata kunci: pemerintah, sektor publik, *whistleblowing system*, *wrongdoing*